

No. Agenda : 905 Tanggal : 13-07-2022 Sifat: <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting/Segera <input type="checkbox"/> Rahasia											
Asal : Inspektur I Nomor : B/IJ-IND.2/PW/VII/2022 Tanggal 08-07-2022 Isi Ringkas : Penyampaian Laporan PP39 TW II tahun 2022 Lampiran :											
<p><u>Diteruskan kepada:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kabag Program, Evaluasi, dan Pelaporan</p> <p><input type="checkbox"/> Kabag Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil</p> <p><input type="checkbox"/> Kabag Umum</p> <p><input type="checkbox"/> Kabag Kepegawaian, Hukum dan Organisasi</p> <p><input type="checkbox"/> Auditor</p> <p><input type="checkbox"/> Sekretaris</p> <p><input type="checkbox"/> Klinik Itjen</p> <p><u>Catatan:</u></p> <table style="width:100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Diketahui/Diperhatikan</td> <td><input type="checkbox"/> Di Laksanakan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dipelajari</td> <td><input type="checkbox"/> Database</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Ditanggapi</td> <td><input type="checkbox"/> Diteruskan ke...</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Disiapkan Konsep</td> <td><input type="checkbox"/> File</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dibicarakan dengan pimpinan</td> <td><input type="checkbox"/> Diselesaikan</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Diketahui/Diperhatikan	<input type="checkbox"/> Di Laksanakan	<input type="checkbox"/> Dipelajari	<input type="checkbox"/> Database	<input type="checkbox"/> Ditanggapi	<input type="checkbox"/> Diteruskan ke...	<input type="checkbox"/> Disiapkan Konsep	<input type="checkbox"/> File	<input type="checkbox"/> Dibicarakan dengan pimpinan	<input type="checkbox"/> Diselesaikan	<p><u>ISI DISPOSISI</u></p> <p>Mba Rika: tolog kompiling bersama laporan lainnya. trmksh 13.7.22 WS</p>
<input type="checkbox"/> Diketahui/Diperhatikan	<input type="checkbox"/> Di Laksanakan										
<input type="checkbox"/> Dipelajari	<input type="checkbox"/> Database										
<input type="checkbox"/> Ditanggapi	<input type="checkbox"/> Diteruskan ke...										
<input type="checkbox"/> Disiapkan Konsep	<input type="checkbox"/> File										
<input type="checkbox"/> Dibicarakan dengan pimpinan	<input type="checkbox"/> Diselesaikan										
Diterima tanggal: No. Agenda: Diteruskan: Kepada : Tanggal :	Disposisi Kabag/Kabid/Kasubdit										
Diterima tanggal: Diteruskan: Kepada : Tanggal :	Disposisi Kasubbag/Kasubbid/Kasi										

NOTA DINAS

Nomor B/ 89 / IJ-IND.2/PW/VII/2022

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Perihal : Penyampaian Laporan PP39 Triwulan II Tahun 2022 Inspektorat I
Lampiran : 3 (tiga) Berkas

Tanggal : 8 Juli 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan PP39 Triwulan II Inspektorat I Tahun 2022.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Inspektur I ¹⁴


Bayu Fajar Nugroho

Tembusan:
Sekretaris Itjen.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT I
TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Juli 2022**

**LAPORAN RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN
INSPEKTORAT I
TRIWULAN II
TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Juli 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Inspektorat I dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2022.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama Triwulan II Tahun 2022.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang capaian kinerja Inspektorat I periode Triwulan II Tahun 2022. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan pada periode berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 8 Juli 2022

Inspektur I



Bayu Fajar Nugroho

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	3
C. Struktur Organisasi	4
BAB II : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	6
A. Program/Kegiatan Tahun 2022	6
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	8
BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	21
A. Hasil yang Telah Dicapai	21
B. Analisis Capaian Kinerja	24
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	26
D. Langkah Tindak Lanjut	27
BAB IV : PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29
LAMPIRAN : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II INSPEKTORAT I TAHUN ANGGARAN 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari 2 unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal di lingkungan yaitu 9 satuan kerja SMK, 12. satuan kerja Politeknik dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intenal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2022 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

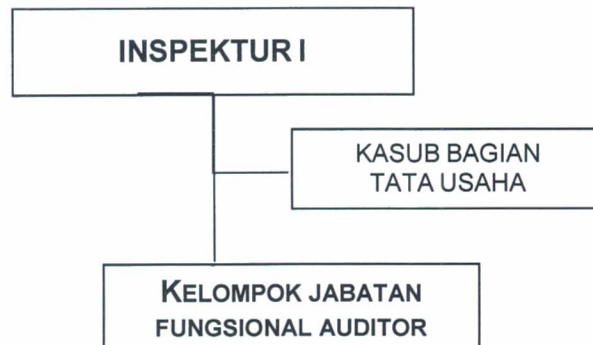
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat..

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari

1. Inspektur I

Melaksanakan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnnya.

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang terdiri dari:

- a. Auditor Utama : 1 orang;
- b. Auditor Madya : 1 orang;
- c. Auditor Muda : 6 orang;
- d. Auditor Pertama : 7 orang.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindtrian Cakupan Tugas Inspektorat I** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	
3.	Layanan Audit Internal	155 Laporan	
	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	26 Laporan	
	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	85 Laporan	
	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	28 Laporan	
	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	4 Laporan	

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp 2.108.753.000,- namun pada bulan Desember 2021 telah ditetapkan untuk dilakukan blokir mandiri sebesar Rp. 225.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2022

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	VOLUME	PAGU
WA	Program Dukungan Manajemen		2.108.753.000
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I		2.108.753.000
1841.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		50.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran		22.700.000
51	<i>Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran</i>		22.700.000
A	Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran		22.700.000
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi		27.300.000
51	<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat I</i>		27.300.000
A	Penyusunan Evaluasi Triwulanan Dan Tahunan		27.300.000
1841.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.058.753.000
965	Layanan Audit Internal		2.058.753.000
51	<i>Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		1.058.747.000
A	Pelaksanaan Audit Kinerja		1.048.287.000
B	Pelaksanaan Audit Khusus		10.460.000
52	<i>Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		282.000.000
A	Pelaksanaan Reviu Pipk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		35.000.000
B	Pelaksanaan Reviu Lk/bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		153.000.000
C	Pelaksanaan Reviu Rkaki Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		65.000.000
D	Pelaksanaan Reviu Rkbmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		29.000.000
53	<i>Monitoring Dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		73.000.000
A	Pelaksanaan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		73.000.000
54	<i>Konsulting Dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		645.006.000
A	Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		263.988.000
B	Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		142.862.000
C	Sosialisasi/pendampingan Implementasi Spip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I		238.156.000

TOTAL	2.108.753.000
--------------	----------------------

Tabel 3. Revisi Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2021

Jenis Kegiatan		PAGU Anggaran
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1.058.747.000
2	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	282.000.000
3	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	73.000.000
4	Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	645.006.000
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	22.700.000
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	27.300.000
Total		2.108.753.000

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,4%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	8%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat	IKU	91%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	IK	91,5%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	77%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	80%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%

TABEL PERHITUNGAN													
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN													
		<p>Untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku</p> <p>Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah kurang <1,4% dari satu koma empat persen.</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">$x \leq 1,4\%$</p> <p style="text-align: center;">dimana</p> <p style="text-align: center;">$x = \frac{\Delta mt}{\Delta aa} \times 100\%$</p> </div> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Δmt</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Δaa</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">-</p>			x	:	batas maksimum	Δmt	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang	Δaa	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I
x	:	batas maksimum											
Δmt	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang											
Δaa	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I											
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IKU	8%									
		Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja											

		<p>Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">$x \leq 8\%$</p> <p>dimana</p> $x = \frac{\Delta TPTD}{\Delta R} \times 100\%$ </div> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$\Delta TPTD$</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔR</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun</td> </tr> </table>			x	:	batas maksimum	$\Delta TPTD$:	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	ΔR	:	total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
x	:	batas maksimum											
$\Delta TPTD$:	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti											
ΔR	:	total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun											
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%									
		<p>Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">$x \geq 85\%$</p> <p>dimana</p> $x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM} \times 100\%$ </div> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔAT</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔAM</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem</td> </tr> </table>			x	:	batas maksimum	ΔAT	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi	ΔAM	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem
x	:	batas maksimum											
ΔAT	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi											
ΔAM	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem											

		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat	IKU	91%									
		<p>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satuan kerja dibagi dengan jumlah total rekomendasi</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">$x \geq 91\%$ dimana $x = \frac{\Delta RAHP}{\Delta RHP} \times 100\%$</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$\Delta RAHP$</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔRHP</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>total rekomendasi hasil pengawasan</td> </tr> </table>			x	:	batas maksimum	$\Delta RAHP$:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi	ΔRHP	:	total rekomendasi hasil pengawasan
x	:	batas maksimum											
$\Delta RAHP$:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi											
ΔRHP	:	total rekomendasi hasil pengawasan											
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91,5%									
		<p>Hasil penilaian Maturitas SPIP berdasarkan quality Assurance BPKP terhadap Kementerian Perindustrian</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">$x \geq 91,5\%$ dimana $x = \frac{\Delta SMRI}{\Delta SBI} \times 100\%$</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$\Delta SMRI$</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas level 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔSBI</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai</td> </tr> </table>			x	:	batas maksimum	$\Delta SMRI$:	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas level 3	ΔSBI	:	Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai
x	:	batas maksimum											
$\Delta SMRI$:	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas level 3											
ΔSBI	:	Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai											
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL													
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%									
		<p>Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)</td> <td style="text-align: center;">IK</td> <td style="text-align: center;">76%</td> </tr> </table>			Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%						
Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%											
		Menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKA-K/L											

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN													
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%									
		<p>Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $x \geq 70\%$ <p>dimana</p> $x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} \times 100\%$ </div> <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔRSP</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔRP</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah rencana Pengawasan</td> </tr> </table>			x	:	batas maksimum	ΔRSP	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	ΔRP	:	Jumlah rencana Pengawasan
x	:	batas maksimum											
ΔRSP	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT											
ΔRP	:	Jumlah rencana Pengawasan											
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%									
		<p>Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan dengan sertifikasi JFA</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $x \geq 80\%$ <p>dimana</p> $x = \frac{\Delta JFA}{\Delta JP} \times 100\%$ </div> <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔJFA</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔJP</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Penugasan pengawasan</td> </tr> </table>			x	:	batas maksimum	ΔJFA	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat	ΔJP	:	Jumlah Penugasan pengawasan
x	:	batas maksimum											
ΔJFA	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat											
ΔJP	:	Jumlah Penugasan pengawasan											

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT I**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN				
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	
Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja tugas Inspektorat I				1,4%	1841	Rp. 788.241.000,-	16,73%	50,18%	23,00%	10,09%	
								58,49%	38,99%	-	2,52%	
					8%				45,54%	54,55%	-	-
	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I				85%							
	Pengaduan masyarakat berkedar pengawasan yang ditindaklanjuti				91,5%							
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)JKU											

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Manajemen saterker cakupan Inspektorat I	penerapan Risiko tugas Inspektorat I				91,5%	Consulting Pengawasan Program Cakupan Kegiatan Tugas Inspektorat I dan Pelaksanaan Program Kegiatan Tugas Inspektorat I		Rp. 486.167.000,-	32,67%	32,67%	32,67%	1,99%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL													
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	kesesuaian dengan pelaksanaan				75%				-	-	-	-
	Penerapan Berbasis (TABK)	Teknik Audit Komputer				77%				-	-	-	-
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN													
Terwujudnya Sistem Manajemen Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat pelaksanaan pengawasan PKPT	kesesuaian dengan				80%	Anggaran Kerja Inspektorat I		Rp. 32.070.000,-	24,95%	24,95%	25,18%	24,92%
	Tingkat pengawasan dengan perannya	kesesuaian SDM sesuai dengan perannya				90%	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I		Rp. 8.320.000,-	28,25%	28,25%	28,25%	15,25%

CAPAIAN RENCANA AKSI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I		PIC	KETERANGAN
		RENCANA	REALISASI		
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian				

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II		PIC	KETERANGAN
		RENCANA	REALISASI		
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian				

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III		PIC	KETERANGAN
		RENCANA	REALISASI		
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian				

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV		PIC	KETERANGAN
		RENCANA	REALISASI		
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian				

Sehubungan dengan berubahnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemic terjadi perubahan-perubahan rencana strategis Kementerian Perindustrian sehingga sasaran perkin diubah menjadi, sebagai berikut:

RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Pengelola Indikator	Cara Pengukuran
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,00%	Ir I, II, III, IV	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah < 1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemerperin TA 2020
2		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	100%	Ir I, II, III, IV	Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
3		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91%	91,50%	92%	92,50%	93,00%	Ir I, II, III, IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi (T-1), Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020

2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)JKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Ir I, II, III, IV	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan, dilakukan usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan)
Internal Process Perspective											
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektoral Jenderal	75%	75%	80%	80%	85%	85%	Ir I, II, III, IV	Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAPI. Pada tahun 2022, kuesioner akan disebarluaskan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektoral disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76%	77%	78%	79%	80%	Ir I, II, III, IV	<p>Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam pencetakan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor - Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll) *Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan -Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll) - Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data - Tahap Pelaporan menggunakan Office
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I/II/III/IV/ *]IKU	belum ada	75%	80%	85%	90%	IR I, II, III, dan IV	<p>RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.</p> <p>TotA_{P3DN} = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> <p>TotA_{P3DN} = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> <p>Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.</p>

Learn & Growth Perspective										
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%	Ir I, II, III, IV	Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penguasaan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%	Ir I, II, III, IV	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

Sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat I Tahun 2022. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat I, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
 - a. Audit Internal
 - Melaksanakan audit kinerja pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan audit khusus dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - b. Reviu
 - Melaksanakan reviu LK-BMN pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan reviu pengadaan barang dan jasa dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan reviu anggaran pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - c. Monitoring
 - Melaksanakan penilaian SAKIP unit Eselon II dan UPT pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pendampingan implementasi manajemen resiko, sosialisasi, dan pembinaan pengawasan
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan dan menerapkan penjaminan kualitas yang memadai;

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Hasil yang Telah Dicapai

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sesuai **aplikasi PP39** telah mencapai 24,36% atau sebesar Rp. 513.692.230,- dari target 21,68%, sedangkan realisasi fisik sebesar 23,55% dari target fisik sebesar 25,94%.

Sesuai dengan aplikasi *e-Monitoring* dan monitoring secara manual, realisasi anggaran Inspektorat I s/d triwulan II telah mencapai 63,11% atau sebesar Rp. 1.330.834.018,- dari target 59%.

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-Monitoring* yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu penginputan SP2D karena mekanisme TUP. Sementara itu, realisasi fisik kegiatan Inspektorat I sesuai aplikasi *e-Monitoring* telah mencapai 59,70% dari target sebesar 63,81%. Hasil ini masih telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan dengan pelaksanaan, dengan yang tidak bisa di triwulan sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik sampai dengan akhir triwulan III.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	PAGU Anggaran	Triwulan ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
TAK Layanan Pengawasan Internal	2.108.753.000	23,55	513.692.230	24,36	63,81	1.330.834.018	63,11	26,19	777.918.981,70	26,89

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan Ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
1 Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1.085.753.000	13,00	67.000.485	8,5	85	694.039.809	65,55	-	391.713.191	36,07
2 Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	282.000.000	23,22	50.995.600	0,79	55	148.600.000	52,70	-	133.400.000	47,30
3 Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	73.000.000	100	73.000.000	100	100	73.000.000	100	-	0	0
4 Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	645.000.000	24,11	181.362.915	28,11	100	385.871.330	59,83	-	259.128.670	40,17
6 Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	22.700.000	50,00	4.219.930	-	100	16.220.000	71,45	-	6.480.000	28,54
6 Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	27.300.000	50,00	13.759.200	50,40	50	13.759.200	50,40	-	13.540.800	49,60
Total	2.108.753.000	23,55	115.078.500	24,36	100	698.077.828	63,81	-	777.918.981,-	26,89

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat I pada Triwulan II Tahun Anggaran 2021 (April– Juni 2022) sebagai berikut:

1. ST 350 Audit Kinerja dan Pengelolaan BMN pada Sekjen Maret sampai Juni
2. ST 770 Webinar Gratifikasi Benturan kepentingan dan Whistleblowing System
3. ST 768 Survei Pendahuluan Audit BPSDMI
4. ST 740 webinar Peningkatan Kapasitas Advisor dan Stakeholder Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
5. ST 685 Pemantau Gedung STTT Bandung
6. ST 737 Webinar Kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji untuk Kemaslahatan Umat
7. ST 736 Webinar Reformasi Tata Kelola Belanja Daerah dalam Undang2 HKPD
8. ST 712 Webinar Public Speaking
9. ST 713 Webinar Risk Management Based on ISO
10. ST 649 Webinar Training Akuntansi forensik dan Audit Investigatif
11. Koordinasi Rencana Pembangunan Gedung IMC di Yogyakarta
12. ST 683 Mengikuti Webinar Effective Technique for Internal Audit
13. ST 682 Mengikuti Webinar Certified Ice Breaker
14. ST 708 Webinar Sambungan Komponen Precast pada Sistem Half Slab
15. ST 709 Webinar Flood Risk Assesment
16. ST 707 Webinar SPBE
17. Melakukan Audit Kinerja pada SMK SMTI Banda Aceh
18. Melakukan Audit Kinerja pada SMK SMTI Pontianak
19. Melakukan Audit Kinerja pada BDI Denpasar
20. Melakukan Audit Kinerja pada Politeknik Bantaeng
21. Melakukan Audit Kinerja pada Politeknik Morowali
22. Melakukan Reviu PAPBJ TW II pada BPSDMI

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat I s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM STAKEHOLDER	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN TW II	TINDAK LANJUT
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV *)JKU	1,3%	Belum dilakukan pengukuran dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan BPK	
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV	90%	100%	Berdasarkan Nota Dinas Nomor 5/IJ.IND.1/KKV/2022 terdapat 2 pengaduan masyarakat berkadar pengawasan secara online dari total 108 pengaduan hingga 30 April 2022
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV *)JKU	92%	Belum dapat diukur dikarenakan masih dalam proses 90 hari	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)JKU	Level 3	Belum dapat diukur dikarenakan masih dalam proses 90 hari	Berkoordinasi dengan sekretariat untuk proses pemantauannya
BUSSINES PROCESS					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat I/II/III/IV	80%	s/d bulan Juni 2022 nilai SKM 3,73 dengan kesimpulan sangat baik	

		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	100%	<p>kegiatan audit dan reviu telah dilaksanakan Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling</p> <p>- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi)</p> <p>*pemberian akses ke seluruh auditor</p> <p>- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)</p> <p>*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan</p> <p>-Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)</p> <p>- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data</p> <p>- Tahap Pelaporan menggunakan Office</p>
LEARN AND GROWTH					
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I *)JKU	80%	Total realisasi pada akun indikator P3DN adalah 63,11% dengan rincian 1,3 M dari total pagu	Terdapat pengukuran yang tidak dapat menunjukkan target antara.
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90%	96%	s/d bulan Juni dari 125 pengujian Kegiatan telah dilakukan sesuai dengan jadwal di PKPT
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	80%	Kegiatan audit terdapat auditor muda yang masih diperankan sebagai anggota tim karena masih kekurangan anggota.

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Tidak semua kegiatan dapat mendukung kinerja dikarenakan adanya pemotongan anggaran, sehingga pencapaian kinerja tidak berdampak secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.
2. Metode *work from home* berdampak terhadap prosedur dan kegiatan Inspektorat I, yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami transisi dan perubahan prosedur.

D. Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan II untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Membudayakan pengendalian resiko ke seluruh satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan.
3. Menerapkan prosedur pengawasan yang berbasis sistem informasi di Inspektorat Jenderal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2022 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sesuai **aplikasi PP39** telah mencapai 24,36% atau sebesar Rp. 513.692.230,- dari target 21,68%, sedangkan realisasi fisik sebesar 23,55% dari target fisik sebesar 25,94%.

Sesuai dengan aplikasi *e-Monitoring* dan monitoring secara manual, realisasi anggaran Inspektorat I s/d triwulan II telah mencapai 63,11% atau sebesar Rp. 1.330.834.018,- dari target 59%.

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-Monitoring* yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu penginputan SP2D karena mekanisme TUP. Sementara itu, realisasi fisik kegiatan Inspektorat I sesuai aplikasi *e-Monitoring* telah mencapai 59,70% dari target sebesar 63,81%. Hasil ini masih telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan dengan pelaksanaan, dengan yang tidak bisa di triwulan sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik sampai dengan akhir triwulan III.

Realisasi ini tidak dapat terukur secara *real time* karena terdapat perbedaan cut off data yang menimbulkan perbedaan data yang signifikan dikarenakan jadwal penginputan yang terkendala karena situasi pandemic yang memaksa bukti-bukti fisik yang harus dilampirkan dalam penginputan tertunda penyampaiannya, sehingga data yang terinput belum menunjukkan realisasi secara *real time*.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi, namun berkenaan dengan situasi dan kondisi

pandemic pelaksanaan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penanggulangan situasi pandemik. Upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan prosedur atau Langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah-masalah pelaksanaan pekerjaan yang hanya bisa diselesaikan di kantor agar dapat diselesaikan kapan saja dan dimana saja.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan II Tahun 2022 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN – II
TAHUN ANGGARAN 2022
INSPEKTORAT I

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3 TIDAK ADA KENDALA	4	5

Jakarta Selatan, 8 Juli 2022

Inspektur | Inspektorat Jenderal


Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	24.00	33.62	33.62	20.00	35.96	13.65	13.65	20.00	59.96	47.27	47.27	DKI JAKARTA
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	38.23	34.44	37.97	36.22	21.72	24.08	26.24	23.79	59.95	58.52	64.21	60.00	DKI JAKARTA
Jumlah	37.32	34.19	37.87	36.15	21.68	24.36	25.94	23.55	59.00	58.55	63.81	59.70	

FORMULIR A

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022
 INSPEKTORAT I

I. DATA UMUM

- 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
- 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
- 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
- 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
- 5. Indikator Hasil :
- 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 1841 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tug
- 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
- 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Bayu Fajar Nugroho, ST., MPP
- 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
- 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA- 019.06.1.247885/2022

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal			50,000	50,000		6 Dokumen
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal			2,058,753	2,058,753		155 Dokumen
Total			2,108,753	2,108,753		